

PERANCANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019 PADA BPS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Windri Dwi Novanni, Liana Sukma, Rasmila

Teknik Informatika, Universitas Bina Dharma

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 12, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Indonesia

windri.23142024p@gmail.com

ABSTRAK

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data statistik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. BPS menyediakan berbagai informasi statistik yang mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan demografi yang penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat regional dan nasional. Dalam era digital yang semakin berkembang, tata kelola teknologi informasi merupakan aspek yang penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional bagi organisasi atau instansi pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai instansi pemerintah juga menghadapi kebutuhan untuk memiliki tata kelola teknologi informasi yang tangguh. Penelitian ini bertujuan untuk merancang tata kelola teknologi informasi yang responsif menggunakan kerangka kerja COBIT 2019, yang diakui secara internasional sebagai standar terbaik dalam pengelolaan teknologi informasi. Kerangka kerja COBIT 2019 memberikan pendekatan komprehensif untuk memastikan bahwa inisiatif teknologi informasi sejalan dengan tujuan organisasi. Dengan menerapkan COBIT 2019, BPS Sumatera Selatan dapat menciptakan keselarasan antara strategi teknologi informasi dan misi organisasi, sekaligus memastikan bahwa investasi teknologi informasi memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk merancang tata kelola teknologi informasi di BPS Provinsi Sumatera Selatan. Data penelitian dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner berbasis kerangka kerja COBIT 2019.

Kata kunci : tata kelola, teknologi informasi, COBIT 2019

1. PENDAHULUAN

Dokumen Teknologi Informasi (TI) telah menjadi elemen krusial dalam mengelola transaksi, mengolah data, serta mengumpulkan dan mendistribusikan informasi. Untuk sejumlah organisasi, TI menjadi aspek yang sangat fundamental dalam mendukung, memperkuat, merubah, dan mengembangkan usaha[1].

Saat ini, kemajuan dalam teknologi informasi menjadi elemen krusial bagi setiap organisasi atau perusahaan. Implementasi teknologi informasi memerlukan investasi yang besar, oleh karena itu pengelolaan TI yang mendalam sangatlah penting. Dengan adanya pengelolaan TI yang tepat, proses TI yang ada akan dapat berfungsi dengan cara yang teratur, terstruktur, efektif, efisien, serta dapat menekan biaya operasional dan memperkuat daya saing. [2].

Penggunaan TI oleh institusi pemerintahan telah dilakukan sejak beberapa puluh tahun lalu, dengan intensitas yang semakin meningkat. Demi memastikan penggunaan TI tersebut mendukung tujuan dari pelaksanaan pemerintahan, dengan menimbang efisiensi dalam penggunaan sumber daya serta manajemen risiko yang berhubungan, diperlukan *Good Governance* terkait dengan TI, yang disebut sebagai “Tata Kelola TI” [3].

Sebenarnya, penerapan tata kelola teknologi informasi tidak selalu berjalan dengan baik. Berbagai tantangan dan kendala bisa timbul karena beberapa faktor, seperti kurangnya dukungan dari manajemen atas terhadap penggunaan teknologi informasi, penyelarasan strategi yang kurang efektif, pengelolaan

risiko yang buruk, serta pengelolaan sumber daya yang tidak efisien [4].

Tata kelola TI tidak hanya berperan sebagai pendukung (*support*) tetapi juga menjadi elemen penting dalam menentukan keberhasilan suatu institusi atau perusahaan. Sementara itu, tata kelola TI juga sangat berperan dalam mendukung kegiatan di BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Manajemen Teknologi Informasi tidak hanya berperan sebagai penyokong, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menentukan keberhasilan suatu institusi atau perusahaan. Di samping itu, pengelolaan TI juga memiliki peran yang signifikan dalam mendukung aktivitas di BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data statistik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. BPS menyediakan berbagai informasi statistik yang mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan demografi yang penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat regional dan nasional. Mengingat betapa vitalnya tanggung jawab BPS Provinsi Sumatera Selatan, sampai saat ini belum terdapat indikator yang dapat menilai tingkat kematangan dalam pengelolaan teknologi informasi.

Salah satu kerangka kerja pengelolaan teknologi informasi yang bisa diterapkan adalah COBIT 2019. COBIT 2019 menekankan pada prinsip-prinsip pengelolaan teknologi informasi (TI) secara menyeluruh, memberikan panduan terperinci untuk

mengelola risiko sekaligus memaksimalkan nilai dari investasi TI.

COBIT 2019 berperan dalam mengoptimalkan penilaian atas informasi dan teknologi, mendukung organisasi meminimalkan risiko, memaksimalkan keuntungan, serta mengelola sumber daya secara efisien [5].

Salah satu fokus utama dari kerangka kerja ini adalah membangun hubungan yang sinergis antara pengelolaan bisnis dan teknologi informasi. Dengan pendekatan ini, COBIT 2019 membantu organisasi memahami peran strategis TI dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis, sekaligus mengidentifikasi dampak pengambilan keputusan TI terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, COBIT 2019 menyediakan panduan komprehensif untuk pengelolaan risiko TI. Dalam era digital yang semakin kompleks dan saling terhubung, ancaman terhadap keamanan informasi serta kerentanan sistem menjadi perhatian serius. Kerangka kerja ini menawarkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan tersebut secara efektif.

Hasil kuesioner yang telah disebarakan kepada responden di BPS Provinsi Sumatera Selatan akan dianalisa menggunakan metode SWOT SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi tata kelola teknologi informasi dan juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas serta efisiensi pengelolaan teknologi informasi sesuai dengan kerangka kerja COBIT 2019.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori fundamental yang akan digunakan dalam penelitian ini sangat penting untuk mendukung analisis yang dilakukan. Dasar teori yang akan diterapkan meliputi Tata Kelola Teknologi Informasi, COBIT 2019, dan analisis SWOT.

2.1. Tata kelola Teknologi Informasi

Tata kelola teknologi informasi (TI) adalah proses penerapan kerangka kelembagaan yang bertujuan untuk mengambil keputusan konkrit dan mengatur penggunaan teknologi informasi secara sistematis. Tujuannya adalah untuk memahami berbagai isu dan manfaat strategis yang terkait dengan teknologi informasi sehingga perusahaan dapat menerapkan strategi untuk menjaga kelangsungan bisnis dan meningkatkan daya saing saat ini dan masa depan. Tata kelola teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses yang bertujuan untuk mengendalikan dan memantau keputusan terkait teknologi informasi sehingga pemangku kepentingan organisasi memperoleh manfaat optimal dari penggunaannya. Tujuan tata kelola teknologi informasi adalah untuk memenuhi harapan mengenai penggunaan teknologi informasi dan juga memastikan bahwa risiko yang terkait dengan teknologi informasi dapat diminimalkan [6].

Ada lima area utama dalam pengelolaan teknologi informasi, yang meliputi:

- Keselaranan Strategis (*Strategic Alignment*)**
Bertujuan untuk memastikan bahwa strategi bisnis sejalan dengan strategi teknologi informasi, serta membangun konsistensi antara operasional teknologi informasi dan operasional lembaga.
- Penyampaian Nilai (*Value Delivery*)**
Berorientasi pada penyampaian layanan teknologi informasi yang efisien, pengoptimalan pengeluaran teknologi informasi, dan pembuktian manfaat dari investasi yang dilakukan dalam teknologi.
- Pengelolaan Risiko (*Risk Management*)**
Bertujuan untuk memaksimalkan investasi lembaga dalam berbagai sumber daya teknologi informasi, termasuk data, perangkat keras, perangkat lunak, layanan, infrastruktur, dan tenaga kerja, dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul.
- Pengelolaan Sumber Daya (*Resource Management*)**
Menjamin bahwa sumber daya teknologi informasi dimanfaatkan secara efisien dan efektif, serta mengintegrasikan risiko terkait teknologi informasi ke dalam proses bisnis lembaga.
- Pengukuran Kinerja (*Performance Management*)**
Menetapkan tujuan untuk memonitor pelaksanaan strategi teknologi informasi, penggunaan sumber daya teknologi informasi, dan evaluasi kinerja pengelolaan teknologi informasi secara keseluruhan.

Melalui penerapan pengelolaan teknologi informasi yang efektif, suatu organisasi dapat meningkatkan keuntungan dari teknologi informasi, mengurangi kemungkinan risiko, dan memastikan bahwa proses teknologi informasi berlangsung selaras dengan Sasaran strategis yang telah ditentukan.

2.2. COBIT

COBIT merupakan salah satu dari beberapa kerangka kerja yang ada. COBIT merupakan kerangka kerja yang menyediakan solusi untuk tata kelola teknologi informasi melalui domain proses, tujuan, kegiatan, model kematangan dan struktur yang logis dan teratur [7].

COBIT 2019 adalah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu bisnis mengelola dan mengendalikan teknologi informasi mereka. COBIT adalah singkatan dari *Control Objectives for Information and Associated Technologies*, dan dikembangkan oleh *Information Systems Audit and Control Association* (ISACA) sebagai istilah umum yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan bisnis mereka dengan menerapkan manajemen dan pengendalian teknologi informasi yang efektif sebuah panduan. Kerangka COBIT 2019 memberikan serangkaian prinsip dan konsep yang dapat diadopsi organisasi untuk memahami dan menerapkan praktik terbaik manajemen teknologi informasi. COBIT 2019 menetapkan lima prinsip utama yaitu memenuhi permintaan pemangku kepentingan, meningkatkan nilai bisnis, mengelola risiko, menggunakan sumber daya secara efisien, dan memastikan keberlanjutan.

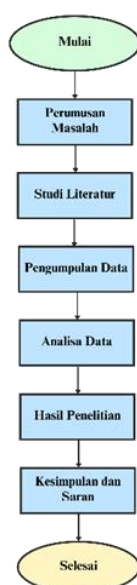
COBIT 2019 juga menyediakan serangkaian tujuan pengendalian yang dibagi menjadi lima area: mengevaluasi, mengarahkan, memantau, merencanakan, dan membuat. Kerangka kerja ini dikaitkan dengan tujuh elemen yang berkontribusi terhadap keberhasilan manajemen TI: prinsip, kebijakan, proses, organisasi, infrastruktur, informasi, dan layanan [8].

2.3. SWOT

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang mencerminkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman, adalah sebuah matriks yang secara jelas menunjukkan peluang yang ada dengan menerapkan strategi S-O (*Strength-Opportunity*), yaitu Kekuatan-Peluang, dan memanfaatkan kekuatan dalam menghadapi ancaman melalui strategi S-T (*Strength-Threat*), atau Kekuatan-Ancaman. Di samping itu, analisis ini juga bertujuan untuk meminimalkan kelemahan yang ada dalam sistem dan memanfaatkan peluang yang tersedia melalui strategi W-O (*Weakness-Opportunity*), yang merupakan Kelemahan-Peluang, serta mengatasi ancaman dengan strategi W-T (*Weakness-Threat*), yang dikenal sebagai Kelemahan-Ancaman [9].

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk merancang tata kelola teknologi informasi di BPS Provinsi Sumatera Selatan. Data penelitian dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner berbasis kerangka kerja COBIT 2019. Peran COBIT 2019 dalam instansi adalah sebagai mekanisme pengendalian yang bertujuan untuk membantu instansi meningkatkan kinerja, dengan berfokus pada pengelolaan risiko, meraih peluang keuntungan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia [10]. Adapun urutan tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Penelitian

Dalam metodologi penelitian, ada beberapa tahapan kegiatan yang saling berkaitan seperti pada Gambar 1 dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pada tahap awal yang menjadi dasar dalam mengidentifikasi masalah, risiko, serta kendala yang dihadapi oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan dalam tata kelola teknologi informasi. Tahap ini difokuskan pada analisis masalah berdasarkan 4 (empat) domain utama kerangka kerja COBIT 2019.
- Tahap selanjutnya adalah studi literatur untuk mencari dan memperdalam teori yang relevan dengan penelitian dengan sumber data yang berasal dari berbagai referensi untuk mendukung dan memperkuat data yang digunakan dalam penelitian.
- Pada tahap pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berbasis skala Likert kepada responden yang terpilih baik secara daring maupun luring untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih akurat. Data yang dikumpulkan akan diolah dengan analisis masalah menggunakan metode SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), serta ancaman (*Threats*) yang dihadapi oleh instansi dalam pengimplementasian tata kelola teknologi informasi.
- Tahap hasil penelitian merupakan penyajian data dan informasi yang telah diolah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi tata kelola teknologi informasi di BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- Kesimpulan dan saran memunculkan rekomendasi strategis untuk membantu BPS Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan tata kelola teknologi informasi yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan mendatang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kuesioner yang telah disebarkan kepada responden di BPS Provinsi Sumatera Selatan akan dianalisa menggunakan metode SWOT untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi tata kelola teknologi informasi dan juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas serta efisiensi pengelolaan teknologi informasi sesuai dengan kerangka kerja COBIT 2019. Berikut tabel analisis SWOT yang menunjukkan hasil analisis dari data yang terkumpul di BPS Provinsi Sumatera Selatan:

Tabel 1. Analisa SWOT

	Strengths (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
	1. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terlatih dalam mendukung pengelolaan serta implementasi tata kelola TI. 2. Mekanisme pelaporan kendala TI yang mudah menunjukkan keberfungsian tata kelola yang telah berjalan dengan baik. 3. Tersedianya dokumentasi hasil audit dan evaluasi rutin yang memberikan landasan untuk perbaikan kualitas tata kelola TI. 4. Adanya pemantauan risiko secara rutin yang mendukung deteksi dini dan pengelolaan risiko secara proaktif.	1. Ketidaklengkapan dokumen kebijakan formal yang dapat menciptakan celah dalam tata kelola TI. 2. Ketidakteraturan frekuensi audit dan evaluasi yang dapat meningkatkan celah dalam pengawasan tata kelola. 3. Minimnya sosialisasi atau pelatihan kepada pengguna layanan TI di BPS Provinsi Sumatera Selatan. 4. Kurang terlibatnya pengguna layanan TI dalam proses evaluasi kinerja, sehingga mengurangi relevansi kebijakan.
Opportunities (Kesempatan)	Strengths Opportunities (SO)	Weakness Opportunities (WO)
1. Peningkatan standar tata kelola dengan menyelaraskan kebijakan organisasi dengan standar tata kelola terbaru. 2. Meningkatkan keterampilan dan pemahaman pengguna layanan TI di BPS Provinsi Sumatera Selatan untuk optimalisasi penggunaan TI. 3. Frekuensi evaluasi yang lebih rutin dapat memberikan peluang untuk perbaikan berkelanjutan.	1. Melibatkan SDM yang kompeten untuk menyusun standar tata kelola berbasis kerangka kerja terbaru. 2. Memberikan pelatihan kepada pengguna layanan TI untuk memanfaatkan sistem dengan lebih efektif. 3. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dengan frekuensi yang lebih rutin agar relevansi dan efektivitas tata kelola TI tetap terjaga.	1. Menyusun dokumen kebijakan tata kelola TI yang lengkap berdasarkan standar tata kelola terbaru. 2. Mengadakan pelatihan atau sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait layanan TI. 3. Menetapkan jadwal audit dan evaluasi secara teratur untuk memastikan kualitas tata kelola IT. 4. Menggunakan hasil audit dan evaluasi untuk membuat rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan standar tata kelola TI.
Threats (Ancaman)	Strengths Threats (ST)	Weakness Threats (WT)
1. Minimnya keterlibatan pengguna layanan TI dalam evaluasi dapat mengakibatkan ketidakrelevanan dalam proses perbaikan layanan. 2. Kebijakan formal yang tidak lengkap dapat menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi dan pengelolaan TI. 3. Kurangnya pemantauan secara rutin dapat menjadi penghambat dalam identifikasi dan mitigasi risiko tata kelola TI.	1. Melibatkan pengguna layanan TI secara aktif dalam proses evaluasi sistem dan kebijakan TI di BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2. Memanfaatkan sistem monitoring risiko yang sudah ada serta menggunakan dokumen hasil audit untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko akibat perkembangan teknologi dan perubahan kebijakan. 3. Mengintegrasikan hasil monitoring dan audit sebagai alat mitigasi untuk menjaga konsistensi dalam implementasi kebijakan.	1. Menyusun kebijakan mitigasi risiko yang memastikan pengguna layanan TI mendapatkan pelatihan dan pemahaman terkait layanan TI. 2. Mengembangkan kebijakan yang mendukung adaptasi terhadap perkembangan teknologi sehingga layanan tetap relevan.

Dari Tabel 1. Analisa SWOT dapat dilihat bahwa BPS Provinsi Sumatera Selatan memiliki sejumlah kekuatan yang cukup signifikan untuk mendukung penerapan tata kelola TI yang efektif. Namun, kelemahan yang ada teridentifikasi perlu mendapatkan perhatian lebih agar tata kelola dapat berjalan secara optimal. Dengan memanfaatkan peluang, seperti pelatihan bagi pengguna layanan dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan standar terbaru, serta melakukan mitigasi risiko, tata kelola TI yang ada di BPS Provinsi Sumatera Selatan dapat semakin diperkuat.

Berdasarkan hasil analisis SWOT serta kondisi BPS Provinsi Sumatera Selatan yang teridentifikasi melalui hasil kuesioner dan analisis mendalam

terhadap kebutuhan tata kelola TI, terdapat 2 (dua) domain yang dianggap relevan, yaitu domain APO (*Align, Plan, and Organize*) dan MEA (*Monitor, Evaluate, and Assess*). Domain APO (*Align, Plan, and Organize*) [11] menyediakan kerangka kerja yang berfokus pada penyusunan kebijakan, perencanaan strategis, serta pengelolaan risiko, sehingga dapat memperkuat fondasi tata kelola TI. Sementara itu, domain EDM (*Monitor, Evaluate, and Assess*) berperan dalam proses evaluasi kebijakan dan memastikan keberlanjutan tata kelola TI melalui pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Tabel berikut menyajikan gambaran kondisi di BPS Provinsi Sumatera Selatan sebagai ilustrasi yang mendukung pemilihan domain yang relevan.

Tabel 2. Kondisi Instansi Saat Ini

No	Sub-domain	Keadaan Instansi
1.	APO01 – <i>Managed I&T Management Framework</i>	Belum memiliki dokumen kebijakan formal tata kelola TI yang lengkap dan berdasarkan standar tata kelola yang baru.
2.	APO07 – <i>Managed Human Resources</i>	Memiliki sumber daya manusia yang kompeten, namun sosialisasi atau pelatihan untuk pengguna TI masih minim.
3.	APO11 – <i>Managed Quality</i>	Adanya ketidakteraturan frekuensi audit dan evaluasi sehingga dapat mengurangi efektivitas dalam pengawasan.
4.	APO12 – <i>Managed Risk</i>	Kurangnya pemantauan secara rutin dapat menjadi penghambat dalam identifikasi dan mitigasi risiko tata kelola TI.
5.	MEA01 – <i>Managed Performance and Conformance Monitoring</i>	Keterlibatan pengguna layanan TI dalam proses evaluasi masih tergolong rendah, sehingga dapat mengurangi relevansi dari hasil evaluasi.
6.	MEA04 – <i>Managed Assurance</i>	Belum memiliki dokumen kebijakan formal yang lengkap untuk memastikan efektivitas kebijakan tata kelola TI yang ada.

Dari Tabel 2. Kondisi Instansi Saat Ini, telah digambarkan bagaimana kondisi BPS Provinsi Sumatera Selatan terkait penerapan perubahan tata kelola TI. Untuk memaksimalkan penerapan perubahan tersebut, berikut beberapa rekomendasi

yang dapat diterapkan oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan agar perubahan tata kelola TI dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal:

Tabel 3. Rekomendasi

No	Sub-domain	Rekomendasi
1.	APO01 – <i>Managed I&T Management Framework</i>	1. Menyusun dokumen kebijakan tata kelola TI berbasis kerangka kerja terbaru yang sesuai dengan kebutuhan instansi untuk meningkatkan kualitas tata kelola TI. 2. Melakukan review rutin untuk memastikan kerangka kerja yang digunakan tetap relevan.
2.	APO07 – <i>Managed Human Resources</i>	1. Mengadakan program pelatihan rutin yang melibatkan pengguna layanan agar pemahaman pengguna layanan TI dapat meningkat. 2. Melibatkan pengguna layanan dalam proses evaluasi kinerja untuk memastikan kebijakan tetap relevan.
3.	APO11 – <i>Managed Quality</i>	1. Menetapkan jadwal audit dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas tata kelola TI tetap terjaga. 2. Menggunakan hasil audit dan evaluasi sebagai panduan dalam perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
4.	APO12 – <i>Managed Risk</i>	1. Membuat jadwal pemantauan risiko yang terstruktur untuk mendeteksi dini potensi risiko. 2. Mengkombinasikan hasil audit dan evaluasi ke dalam pengelolaan risiko untuk memperkuat mitigasi risiko.
5.	MEA01 – <i>Managed Performance and Conformance Monitoring</i>	Meningkatkan keterlibatan pengguna layanan TI secara aktif dalam proses evaluasi untuk mendapatkan masukan yang lebih menyeluruh.
6.	MEA04 – <i>Managed Assurance</i>	1. Menyusun dokumen kebijakan tata kelola TI berbasis kerangka kerja terbaru. 2. Menggunakan hasil audit dan evaluasi untuk pengembangan kebijakan perbaikan secara berkala agar sesuai dengan kebutuhan instansi.

Berdasarkan Tabel 3. Rekomendasi yang telah disusun, BPS Provinsi Sumatera Selatan dapat menggunakan rekomendasi ini untuk memiliki sistem tata kelola TI yang lebih terstruktur, efektif dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Hal ini akan mendukung pencapaian tujuan dan strategi instansi secara optimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mempelajari permasalahan yang dihadapi dan solusi pemecahan masalah yang ditawarkan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Tata kelola teknologi informasi di BPS Provinsi Sumatera Selatan yang ada saat ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketidaklengkapan dokumen kebijakan, serta frekuensi

audit yang tidak teratur. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan merancang sistem tata kelola TI yang lebih terstruktur dan berbasis kerangka kerja COBIT 2019. Diharapkan, sistem baru ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan TI serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

Untuk melengkapi hal tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah: Menyusun dokumen kebijakan tata kelola TI yang lebih lengkap dan sesuai dengan standar terbaru. Selain itu, perlu diatur jadwal audit dan evaluasi yang teratur untuk menjaga kualitas dan relevansi tata kelola TI di BPS Provinsi Sumatera Selatan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Applegate, L. Austin, R. D., & Soule, D. L. (2009). *Corporate Information Strategy and Management 8th Edition*. New York: Mc Graw Hill.
- [2] Supriyanto, A. (2005). Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Salemba Infotek.
- [3] Kominfo. (2007). Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika
- [4] Jogiyanto & Abdillah, W. (2011). Sistem Tatakelola Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi.
- [5] A. Ichwani and A. Dewi Farida, 2020. "Pengukuran Tingkat Kapabilitas Manajemen Risiko Sistem Informasi Koperasi Syariah Menggunakan *Framework* COBIT 5," .
- [6] Rasmila, R., Parhan, M.R., Ramadan, M.S. and Novendra, H., 2023. Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi BKN Regional 7 Palembang menggunakan Cobit *Framework*. Jurnal Bina Komputer, 5(2), pp.41-46.
- [7] Swastika, A., Raditya I, 2016. Audit Sistem Informasi dan Tata kelola Teknologi Informasi: Implementasi dan Studi Kasus, Yogyakarta: ANDI.
- [8] Ike Pertiwi Windasaria, A. F. (2021, November). Audit Tata kelola Teknologi Informasi *Domain Monitor, Evaluate, and Assess* dan *Deliver, Service, Support* Berdasarkan *Framework* COBIT 2019. Jurnal Sistem Informasi Bisnis, 1, 131-138.
- [9] R. Rahmi, S. Dalimunthe, and D. Susita, 2021. Analisis SWOT sebagai Upaya Peningkatan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Wilayah Jakarta Timur, Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin, vol. 3, no. 2, pp. 87–95, Sep. 2021, doi: 10.37012/jpkmht.v3i2.698.
- [10] A. Pradipta and A. D. Manuputty, 2022. Perancangan Tata kelola Teknologi Informasi Menggunakan COBIT 2019 Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Salatiga, *J. Comput. Inf. Syst. Ampera*, vol. 3, no. 3, pp. 193–210, 2022, doi: 10.51519/journalcisa.v3i3.293.
- [11] ISACA, *COBIT 2019 Framework - Introduction and Methodology*. 2019.